

**ANALISIS PARTISIPASI PADA PROGRAM HUTAN  
KEMASYARAKATAN  
(STUDI KASUS DI KOTO PANJANG, RIAU)  
(Participation Analisis of Community Forestry Program :  
Case Study in Koto Panjang, Riau)**

Oleh / By :  
Yanto Rochmayanto, Dodi Frianto & Edi Nurrohman

**ABSTRACT**

*Participation is an importance social resources to success a village development program. Successful size of CF program not only biophysical dimension, but also behaviors changing. Study result in Koto Panjang showed that level of community participation were low, and it was classified as participation for incentive level. Community participation were form as an opinion and service/ labor, both were gave on 3 step of CF developing: planning, executing, evaluating.*

*Participation is influenced by internal factors (perception, utility distribution, ages and revenues) and external factors (incentive and communication). Revenues and communication give a significant influences to behavior differences between the village. Even though the general tendency showed that community of Tanjung Alai more participative than Tanjung. Effort to increase participation can approached by optimalization of motorial organization and sharpness of CF and permanent farm system. Community building must be do continuously and spread with persuasive approach method. Revise of CF concept about goal, orientation, process and frame work is necessary to increase the participative forest resources management.*

*Key words : participation, community, Community Forestry (CF)*

**ABSTRAK**

Partisipasi merupakan sumber daya sosial yang sangat berperan besar dalam mensukseskan suatu program pembangunan pedesaan. Ukuran keberhasilan program hutan kemasyarakatan bukan hanya dari dimensi biofisik, tetapi juga perubahan perilaku. Hasil penelitian di Koto Panjang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah, diklasifikasikan sebagai tingkat partisipasi untuk insentif. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemikiran dan tenaga/jasa, yang keduanya diberikan pada 3 tahapan pembangunan HKM : perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal (persepsi, manfaat, umur dan pendapatan) dan faktor eksternal (insentif dan komunikasi). Faktor insentif dan komunikasi memberikan pengaruh nyata pada perbedaan perilaku partisipasi di kedua desa. Sedangkan kecenderungan secara umum adalah masyarakat Desa Tanjung Alai lebih partisipatif dari masyarakat Tanjung. Upaya meningkatkan partisipasi dapat didekati dari optimalisasi organisasi penggerak serta penajaman persepsi HKM dan sistem pertanian menetap. Pembinaan harus dilakukan terus-menerus dan merata dengan metode pendekatan persuasif. Perbaikan konsep HKM tentang target, orientasi, proses dan *frame work* perlu dilakukan menuju pengelolaan sumber daya hutan yang partisipatif.

Kata kunci : partisipasi, masyarakat, hutan kemasyarakatan (HKM).

---

<sup>1</sup>Loka Litbang Hasil Hutan Bukan Kayu

## I. PENDAHULUAN

Hutan kemasyarakatan merupakan pola baru dalam rezim pengelolaan hutan di Indonesia yang berakar pada konsepsi *community based*. Oleh karena itu partisipasi menjadi elemen kunci pada program hutan kemasyarakatan (HKm).

Dalam konteks pembangunan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat seringkali parameter-parameter fisik bukan faktor yang ideal untuk mengukur seberapa besar keberhasilan penerapan program. Ada indikator lain yang lebih relevan dijadikan acuan, yaitu partisipasi. Sebab partisipasi adalah simbol dukungan secara fisik dan psikologis terhadap keputusan dan kebijakan formal.

Hutan kemasyarakatan yang dibangun berdasarkan konsep pengelolaan hutan partisipatif, ukuran keberhasilannya tidak hanya dari seberapa tinggi persen tumbuh tanaman, berapa luas lahan kritis berhasil dihijaukan, atau berapa banyak produk yang dihasilkan. Tetapi ada yang lebih substansial dari ukuran-ukuran fisik tersebut, yaitu seberapa jauh keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan ini.

Oleh karena itu, penilaian dan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menjadi sangat penting. Kegiatan ini akan mengulas sampai sejauh mana efektifitas program HKm dalam mendukung dan meningkatkan partisipasi pada pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi : (1) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada program HKm, (2) tingkat partisipasi masyarakat dalam program HKm, dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam program HKm

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk membenahi bagian-bagian yang belum relevan, (apakah pada mekanisme aplikasi program, para pelaksana, konsepsi yang belum sempurna, atau karakteristik masyarakat). Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan instropeksi untuk membenahan bentuk dukungan terhadap program yang berbasis masyarakat.

## II. METODOLOGI

### A. Kerangka Analisis

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif analisis, yaitu mendeskripsikan hasil yang diperoleh atas pokok masalah berupa sistem kelembagaan HKm. Selanjutnya penelitian dilaksanakan dengan pendekatan survey pada program HKm dengan mengambil 2 desa sebagai pilot proyek pembangunan HKm atas dana bantuan OECF tahun 2000. Desa tersebut yaitu Desa Tanjung dan Desa Tanjung Alai yang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau.

Partisipasi masyarakat pada kegiatan HKm di kedua desa tersebut dianalisa dengan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif serta statistik non parametrik.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada program HKm didekati dengan cara mengobservasi kegiatan masyarakat dan mengidentifikasi substansi yang diberikan masyarakat dalam keikutsertaannya pada pembangunan dan pengelolaan HKm. Selain itu, keikutsertaan masyarakat tersebut diidentifikasi pada beberapa tahapan pembangunan HKm yang dikelompokkan menurut fungsi manajemen, yaitu *planning*

(perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengendalian).

Tingkat partisipasi masyarakat pada program HKm didekati dari perhitungan frekuensi atau persentase pada masing-masing bentuk partisipasi dan pada masing-masing tahapan pembangunan HKm. Penggolongan tingkat partisipasi dibedakan menurut kriteria sebagai berikut:

1. Apabila frekuensi keterlibatannya setara dengan 75% atau lebih menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi,
2. Apabila frekuensi keterlibatannya antara 50% - 74.99% menunjukkan tingkat partisipasi yang sedang,
3. Apabila frekuensi keterlibatannya di bawah 50% lebih menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah.

Perbedaan perilaku partisipasi pada kedua desa menurut bentuk dan tahapannya dapat diperbandingkan dengan pendekatan analisis *chi square*, sehingga dapat diketahui apakah perilaku partisipasi antara kedua desa tersebut berbeda secara signifikan atau memiliki pola partisipasi yang relatif sama.

Selanjutnya, diidentifikasi sejumlah faktor internal dan eksternal yang diduga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program HKm. Tingkat pengaruhnya didekati menurut frekuensi dan prosentase, sedangkan perbedaan perilaku faktor-faktor tersebut dalam hubungannya dengan kemampuan memberikan pengaruh terhadap partisipasi di kedua desa dianalisa melalui pendekatan *chi square*.

## B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan kuisioner, yang berisi daftar pertanyaan terstruktur sesuai dengan variable yang akan dianalisa. Responden yang terpilih sebanyak 67 orang peserta HKm yang ditetapkan secara acak sederhana. Digunakan juga wawancara dan diskusi kelompok untuk menjangkit data dan informasi yang menyangkut kemauan dan kemampuan berpartisipasi. Disamping itu untuk melihat realita pelaksanaan HKm diadakan observasi secara langsung dilapangan dan studi dokumentasi.

## C. Metode Analisa Data

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif analisis, karena bertujuan mendiskripsikan hasil yang diperoleh atas kajian dari pokok masalah. Untuk mengetahui hubungan antar variable digunakan uji statistik kai kuadrat dengan formula koreksi Yates (Simon, 1996 dan Sugiyono, 2002) :

$$X^2 = \frac{n (|ac-bd| - 1/2 n)^2}{(a+b) (a+c) (b+d) (c+d)}$$

Keterangan:

X<sup>2</sup> : Nilai kai kuadrat

a : Frekuensi pada kategori 1, kelompok 1

b : Frekuensi pada kategori 2, kelompok 1

c : Frekuensi pada kategori 1, kelompok 2

d : Frekuensi pada kategori 2, kelompok 2

n : Jumlah sampel

Nilai kai kuadrat hitung dibandingkan dengan nilai kai kuadrat tabel pada taraf nyata 0,05, dengan kriteria keputusan : jika  $X^2$  hitung  $>$   $X^2$  tabel, maka hipotesis awal diterima (perilaku partisipasi berbeda nyata pada kedua desa), sedangkan jika  $X^2$  hitung  $<$   $X^2$  tabel, maka hipotesis awal ditolak (artinya perilaku partisipasi tidak berbeda nyata pada kedua desa).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk-bentuk Partisipasi

HKm Koto Panjang secara administratif terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. HKm Koto Panjang merupakan *pilot project* pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi Riau yang dibangun pada tahun 1999.

Lokasi HKm tersebar pada 2 (dua) desa yaitu Desa Tanjung dan Desa Tanjung Alai, masing-masing seluas 903,80 ha dan 1096,42 ha. Keduanya merupakan areal penyangga bendungan Koto Panjang dengan ketinggian tempat berkisar antara 115-140 mdpl. Keadaan tofografinya secara umum curam sampai dengan sangat curam dengan kemiringan 40% sampai dengan 70%.

Dari hasil identifikasi diketahui bahwa secara umum terdapat dua bentuk partisipasi masyarakat dalam program HKm, yaitu (1) partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, ide, pendapat, kritik dan saran, (2) partisipasi dalam bentuk sumbangan jasa/tenaga. Di kedua desa tidak diketemukan sama sekali partisipasi dalam bentuk materi atau uang, karena memang segala sesuatunya disubsidi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan melalui BPDAS Indragiri Rokan, Pekanbaru.

Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran maupun tenaga atau jasa dituangkan dalam 3 (tiga) tahapan pembangunan HKm, yaitu :

1. Tahap Perencanaan meliputi : pemilihan jenis, penentuan lokasi garapan, musyawarah-musyawarah, pelatihan teknis dan manajemen, pembentukan kelembagaan (pengorganisasian) HKm.
2. Tahap Pelaksanaan meliputi : persiapan lahan, persiapan bahan tanaman, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, penyiangan dan penanggulangan hama dan penyakit).
3. Tahap Pengendalian meliputi : monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan, pertumbuhan tanaman dan kinerja kelompok tani HKm.

Temuan bentuk partisipasi di atas sejalan dengan pengertian partisipasi menurut Awang (2003), yaitu keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, seperti : (a) dalam proses pembentukan keputusan untuk tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber dayanya, (b) pelaksanaan program/proyek secara sukarela, dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program/proyek.

Kaitannya dengan partisipasi pembangunan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dalam hal ini pembangunan di bidang kehutanan, maka partisipasi masyarakat tersebut di atas dapat dilihat dari tiga pandangan : (a) cara pandang dimana partisipasi merupakan pembagian masal dari hasil-hasil pembangunan, (b) cara pandang dimana masyarakat secara masal telah menyumbang jerih payah dalam pembangunan, dan (c) partisipasi harus terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam pembangunan (Awang, 2003).

## B. Tingkat Partisipasi Masyarakat

### 1. Gambaran Umum Partisipasi Masyarakat

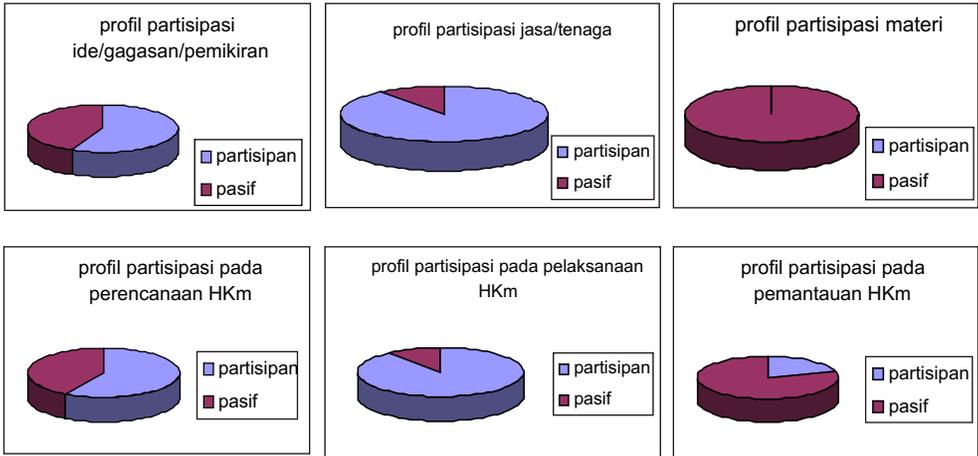
Menurut bentuk keterlibatannya pada program HKm, partisipasi dalam bentuk pemikiran secara umum di kedua desa menunjukkan derajat keterlibatan sedang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2, sebanyak 56.72% responden menunjukkan keterlibatannya, dan sisanya 43.28% tidak terlibat pada proses transformasi gagasan dan perancangan HKm.

Kondisi demikian berkaitan erat dengan pemahaman/persepsi masyarakat (personal maupun kelompok) terhadap program Hutan Kemasyarakatan. Semakin baik persepsi masyarakat akan tujuan, mekanisme, konsep pembagian hak dan kewajiban, serta masalah teknis dan metode HKm akan semakin mendukung motivasi setiap komponen masyarakat untuk memberi andil dalam proses penyusunan kerangka HKm bagi kepentingan mereka sendiri.

Dampak dari tingkat persepsi terhadap HKm dan partisipasi dalam bentuk pemikiran (atau dalam proses perencanaan HKm) sangat nyata pada tinggi rendahnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program HKm secara fisik. Tabel 2 menunjukkan bukti ini, bahwa ternyata pada kelompok masyarakat yang mengalami hambatan persepsi mengakibatkan rendahnya partisipasi pada bentuk pemikiran (proses perencanaan), dan berdampak langsung pada rendahnya partisipasi pada tahap pelaksanaan HKm (atau partisipasi dalam bentuk jasa/tenaga). Tetapi sebaliknya, pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat persepsi dan tingkat partisipasi pemikiran lebih baik, menyebabkan partisipasi pada proses pelaksanaan HKm lebih memuaskan.

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemberian jasa/tenaga menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi (89.55%). Artinya masyarakat secara aktif terlibat pada pekerjaan-pekerjaan lapangan seperti pada kegiatan persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman HKm. Keadaan demikian dipicu oleh 2 (dua) hal pokok, yaitu insentif dan kebutuhan penduduk akan lahan dan pekerjaan. Tetapi daya tarik utama keikutsertaan ini adalah adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa upah persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan lain-lain sehingga seolah-olah masyarakat mendapatkan upah dari pekerjaan di lahan yang dikelolanya sendiri.

Sedangkan pada tahap pemantauan, memperlihatkan tingkat partisipasi yang relatif rendah. Pada umumnya pelaksana proyek HKm hanya melibatkan para ketua kelompok, aparat pemerintahan setempat dan para pemangku adat saja untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian HKm. Oleh karena itu, proses perubahan dan perbaikan terhadap proses implementasi HKm di lapangan belum menjawab secara utuh bagi seluruh pelaku HKm.



Gambar 1. Profil partisipasi berdasarkan bentuk pengorbanan dan tahapan pembangunan HKm.

Figure 1. Profile of participation based on offering form and step of CF establishment

Ketika pola partisipasi HKm ditelaah pada masing-masing tahapan pembangunan HKm, secara umum menunjukkan tingkatan yang beragam. Partisipasi masyarakat cenderung tinggi (89.55%) pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat cenderung sedang (58.21%) pada tahap perencanaan, dan partisipasi masyarakat cenderung lemah (20.90%) pada tahap pemantauan.

Berdasarkan gambaran di atas selanjutnya pola partisipasi masyarakat peserta HKm di Koto Panjang dapat didefinisikan sesuai matriks berikut :

## 2. Perbandingan Perilaku Partisipasi pada Kedua Desa

Di kedua desa terdapat perbedaan perilaku partisipasi bentuk pemikiran yang sangat nyata, ditandai dengan nilai kai kuadrat sebesar 46,21. kecenderungan yang terjadi ternyata di masyarakat Tanjung keterlibatannya relatif rendah, sedangkan di Tanjung Alai cenderung terlibat seluruhnya. Demikian halnya perilaku partisipasi bentuk jasa/tenaga, masyarakat Tanjung Alai lebih kompak dari pada masyarakat Tanjung. Latar belakang pemahaman masyarakat terhadap program HKm ini ternyata memberikan pengaruh cukup besar bagi motivasi mereka pada keikutsertaannya mensukseskan program HKm.

Guna mengantisipasi kondisi diatas diperlukan upaya perubahan pola pendekatan, terutama di Desa Tanjung, dalam implementasi dan sosialisasi kegiatan-kegiatan hutan kemasyarakatan.

Tabel 1. Matriks Pola Partisipasi Masyarakat Hutan Kemasyarakatan Koto Panjang  
 Table 1. Matrix of people participation model in Community Forestry of Koto Panjang

Tingkat partisipasi masyarakat	Bentuk partisipasi	Tahapan pembangunan HKm	Uraian
Tinggi	Jasa/tenaga	Pelaksanaan HKm	Masyarakat banyak turut serta pada pekerjaan-pekerjaan lapangan pembangunan HKm, yaitu pada kegiatan pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Daya tarik utama keikutsertaan ini adalah adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah, sehingga seolah-olah masyarakat mendapatkan upah dari pekerjaan di lahan yang dikelolanya sendiri.
Sedang	Ide/gagasan/pemikiran.	Perencanaan	Lebih dari 50% peserta HKm menunjukkan keikutsertaannya pada sejumlah kegiatan perencanaan HKm Koto Panjang, seperti pada kegiatan pemilihan jenis, pola tanam, penentuan lokasi garapan, pelatihan teknis dan manajemen, pembentukan kelembagaan (pengorganisasian) HKm. Masyarakat menyumbangkan ide, gagasan dan pemikirannya pada acara-acara musyawarah kelompok, pertemuan internal, rapat koordinasi dengan pelaksana proyek HKm.
Kecil	-	Pemantauan	Sebagian kecil peserta HKm terlibat secara aktif pada kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan, pertumbuhan tanaman dan kinerja kelompok tani HKm. Pada umumnya pelaksana proyek HKm hanya melibatkan para ketua kelompok, aparat pemerintahan setempat dan para pemangku adat saja untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian HKm.
Tidak ada	Materi	-	Tidak ada pengorbanan materi dari masyarakat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan/pengendalian HKm. Kondisi ekonomi masyarakat peserta HKm pada umumnya berpendapatan relatif rendah, dengan mata pencaharian sebagai petani.

Tabel 2. Tingkat partisipasi masyarakat menurut bentuk keterlibatannya  
 Table 2. Community participation level based on form of part

Nama Desa (Name of village)	Tingkat keterlibatan dalam bentuk (participation level in form)												Jumlah (Total)
	Pikiran (Idea)				Jasa/Tenaga (Service/Force)				Materi (Goods)				
	Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Tanjung	5	14,71	29	85,29	27	79,41	7	20,59	0	0,00	34	100	34
Tanjung Alai	33	100	0	0,00	33	100	0	0,00	0	0,00	33	100	33
Jumlah	38	56,72	29	43,28	60	89,55	7	10,45	0	0,00	67	100	67
Nilai (X <sup>2</sup> )	46.21*				5.55*				-ε-				

Keterangan (Remarks) :

\* : Berbeda nyata pada 0.05 = 3.481 (Significantly difference at 0.05 = 3.481)

f : frekuensi (frequency)

Menurut perhitungan statistik tampak bahwa masyarakat Tanjung kurang banyak dilibatkan pada tahap perencanaan pembangunan HKM. Partisipasinya sangat lemah, tidak seperti masyarakat Tanjung Alai yang cenderung terlibat seluruhnya. Keadaan ini sejalan dengan keterlibatan mereka dalam bentuk pemikiran yang telah diuraikan diatas. Lemahnya keterlibatan masyarakat Tanjung dalam tahap perencanaan ini menyebabkan ide, gagasan, pemikiran, kritik dan saran tidak bisa tersalur secara optimal.

Pada tahap pelaksanaan, perilaku partisipasi di kedua desa juga menunjukkan pola yang berbeda walaupun secara umum tingkat keterlibatannya relatif tinggi. Pada tahap ini sekitar 89.55% berpartisipasi dan sisanya 10.45% kurang berpartisipasi. Sementara pada tahap perencanaan tingkat keterlibatannya hanya 58.21% terlibat dan 41.79% kurang terlibat, kecenderungannya para peserta kelompok tani HKM di Tanjung Alai lebih partisipatif jika dibandingkan dengan di Tanjung. Tahap pelaksanaan ini berhubungan erat dengan partisipasi dalam bentuk tenaga karena kegiatan HKM menuntut kemauan kerja yang tinggi.

Kelemahan yang paling utama partisipasi pelaksanaan HKM, berdasarkan survey, wawancara langsung dan diskusi kelompok, terletak pada kegiatan pemeliharaan. Karena terjadi perbedaan selera sosial dengan petunjuk teknis pembangunan HKM dari Departemen Kehutanan. Hal ini dilatar belakangi oleh budaya sistem perladangan berpindah yang masih kental pada sisi kehidupan masyarakat. Dalam pengetahuan teknis mereka kaidah pengelolaan lahan adalah dengan pembakaran, pembersihan total dan tanpa pemupukan yang kesemuanya bertolak belakang dengan juknis dan pembinaan pemerintah.

Menyikapi fenomena ini diperlukan perubahan pola pendekatan dan intensifikasi pendampingan serta pembinaan kerja, yang lebih diarahkan pada kelompok masyarakat desa Tanjung.

Tabel 3. Tingkat partisipasi menurut tahapan program HKm

Table 3. Participation level based on step of CF program

Nama Desa (Name of village)	Tingkat keterlibatan pada tahapan (Participation level in step)												Jumlah (Total)
	Perencanaan (Planning)				Pelaksanaan (Actuating)				Pemantauan (Controlling)				
	Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Tanjung	6	17,65	28	82,35	27	79,41	7	20,59	1	2,94	33	97,06	34
Tanjung Alai	33	100	0	0,00	33	100	0	0,00	13	39,39	20	60,61	33
	39	58,21	28	41,79	60	89,55	7	10,45	14	20,90	53	79,10	67
Nilai (X <sup>2</sup> )	43.36*				5.55*				11.35*				

Perilaku partisipasi pada tahap pemantauan belum menyetuh seluruh lapisan sosial. Pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi terbatas hanya pada perangkat organisasi HKm (Koordinator dan ketua kelompok). Lebih dari itu, ternyata di Desa Tanjung tingkat partisipasi pengurus tersebut sangat lemah (2,94%) jika dibandingkan dengan di Tanjung Alai dengan tingkat partisipasi sebesar 39,39%. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi, pelibatan “ninik mamak” dan seluruh peserta HKm harus dibuka lebar-lebar.

### C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam suatu program pemerintah sebagaimana dalam penelitian Rusli (2001) tentang partisipasi masyarakat dalam program gerbang sari di Kabupaten Indragiri Hulu, dipengaruhi oleh faktor internal yang diasumsikan sebagai kemampuan berpartisipasi, dan faktor eksternal yang diasumsikan sebagai faktor penggerak (dinamika organisasi dan penyuluhan/komunikasi).

Mencermati perilaku partisipasi pada program HKm secara holistik dalam bentuknya dan dalam tahapan program, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tanjung dan Tanjung Alai masih relatif rendah dan berjalan alami sesuai dengan keadaan internal masyarakat. Keadaan tersebut terlihat dari hasil uji statistik terhadap 4 faktor internal yaitu persepsi, distribusi manfaat, umur dan pendapatan.

Dari keempat faktor internal di atas hanya pendapatan yang memberikan hubungan nyata dengan partisipasi, sedangkan 3 faktor lainnya tidak memiliki hubungan nyata. Faktor lainnya, sebagai penggerak partisipasi dari luar (eksternal) yang memiliki hubungan nyata dengan partisipasi masyarakat adalah komunikasi (penyuluhan, pelatihan, pendampingan).

Beberapa hal yang menarik dari hasil telaah faktor-faktor internal dan eksternal ini adalah :

Tabel 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Table 4. Factors that influences to participation

Nama Desa (Name of village)	Nilai X <sup>2</sup> Faktor (Value of X <sup>2</sup> from factor)																							
	Insentif (Incentive)				Komunikasi (Communication)				Persepsi (Perception)				Manfaat (Benefits)				Umur (Age)				Pendapatan (Revenue)			
	T		R		T		R		T		R		T		R		T		R		T		R	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Tanjung	34	100	0	0,00	13	38,24	21	61,76	10	29,41	24	70,59	14	41,18	20	58,82	9	26,47	25	75,53	1	2,94	33	97,06
Tjg Alai	33	100	0	0,00	33	100	0	0,00	10	30,30	23	69,70	10	30,30	23	69,70	4	12,12	29	87,88	13	39,39	20	60,61
Jumlah	67	100	0	0,00	46	68,66	21	31,34	20	29,85	47	70,15	24	35,82	43	64,18	13	19,40	54	80,60	14	20,90	53	79,10
(X <sup>2</sup> )	0				26.887*				0.035				0.453				1.383				11.347*			

Keterangan (Remarks) :

\* : Berbeda nyata pada 0.05 = 3.481 (Significantly difference at 0.05 = 3.481)

T : Tinggi (High)

R : Rendah (Low)

f : frekuensi (Frequency)

1. Persepsi masyarakat mengenai HKm sangat lemah. Pola pertanian menetap yang menjadi dasar sistem kerja HKm belum mampu mengubah persepsi sistem perladangan berpindah pada setiap bentuk pengelolaan lahan. Yang paling buruk adalah persepsi *project oriented* yang menganggap bahwa program HKm adalah proyek, yang segala sesuatunya diukur dengan besaran finansial.
2. Masyarakat kurang merasakan manfaat HKm. Hal ini akibat dampak nyata HKm terhadap pendapatan (hasil sadapan karet, buah-buahan dan kayu komersil) baru bisa diperoleh 5-7 tahun sejak penanaman. Sementara tawaran tumpangsari di antara tanaman keras tidak optimal dilakukan untuk menutupi kebutuhan rutin setiap bulan.
3. Partisipasi di kedua desa terjadi akibat adanya insentif atau subsidi dari Departemen Kehutanan pada setiap kegiatan (pengadaan bahan maupun upah kerja). Berkaitan dengan persepsi dan penerimaan manfaat, adanya insentif secara bersama membentuk suatu pemahaman di masyarakat dimana mereka mau bekerja atau berpartisipasi hanya apabila tersedia insentif.

Menurut tingkatan partisipasi Hobbly (1996) dalam Awang (2003) karakter partisipasi di atas dapat digolongkan sebagai tingkat partisipasi untuk insentif. Kelemahan partisipasi model ini adalah jika insentif telah habis maka program dan teknologi yang digunakan tidak akan berlanjut. Sebagai suatu metode stimulasi, pendekatan insentif memang ada baiknya, tetapi perlu diwaspadai agar tidak menyebabkan ketergantungan.

Dengan demikian, yang sangat diperlukan sekarang adalah upaya menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sumber daya hutan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat menuju partisipasi mandiri.

Tabel 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dan Implikasinya  
*Table 5. Factors that influences to participation and their implication*

Faktor	Nilai X <sup>2</sup>	Kesimpulan	Kecenderungan	Saran
Insentif	-ε-	Tak terdefiniskan	Partisipasi pada kedua desa terjadi karena adanya insentif .	Harus disiapkan cara lain untuk mendidik masyarakat supaya tidak tergantung pada insentif.
Komunikasi	26,887	Perilaku partisipasi pada kedua desa berbeda nyata dari pengaruh komunikasi.	Komunikasi proyek HKm di Tanjung dianggap kurang oleh masyarakatnya. Di Tanjung Alai komunikasi relatif menyeluruh.	Penajaman dan perubahan pendekatan komunikasi di Desa Tanjung.
Persepsi	0,035	Perilaku partisipasi di kedua desa tidak ber-beda nyata dari pengaruh persepsi.	Persepsi tentang HKm umumnya rendah di kedua desa.	Pemahaman HKm dan system pertanian menetap perlu ditingkatkan.
Manfaat	0,453	Perilaku partisipasi di kedua desa tidak ber-beda nyata berdasarkan pengaruh dari manfaat HKm.	Kedua kelompok masyarakat masih menganggap manfaat HKm kurang, terutama dari sisi ekonomi.	Perlu adanya aneka usaha jangka pendek untuk menutup kebutuhan rutin.
Umur	1,383	Perilaku Partisipasi di kedua desa tidak ber-beda nyata dari pengaruh tingkat umur.	Para peserta HKm di kedua desa mayoritas berusia 50 tahun ke bawah.	Sasaran peserta dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya mengarah ke kelompok usia muda.
Pendapatan	11,347	Perilaku partisipasi di kedua desa berbeda nyata dari pengaruh tingkat pendapatan.	Masyarakat Tanjung yang tingkat pendapatannya rendah lebih banya berpartisipasi dibandingkan dengan masyarakat Tanjung Alai.	Sasaran peserta di Tanjung Alai sebaiknya lebih diarahkan pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 6. Tingkatan dan Karakter Partisipasi

Table 6. Levels and Characters of Participation

Tingkat (Level)	Nama partisipasi (Name of participation)	Karakter (Character)
1.	Manipulasi Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersifat keterwakilan</li> <li>• Tidak berbasis pada partisipasi individu</li> </ul>
2.	Partisipasi Pasif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi pada apa yang telah diputuskan</li> <li>• Informasi dari administrator tanpa perlu respon masyarakat atas keputusan/informasi</li> </ul>
3.	Partisipasi Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi rakyat dengan konsultasi, menjawab pertanyaan.</li> <li>• Definisi masalah, pengumpulan informasi dan analisa pengambilan keputusan bukan oleh masyarakat.</li> </ul>
4.	Partisipasi untuk insentif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan sumber daya,, pangan, pendapatan atau insentif material lainnya.</li> </ul>
5.	Partisipasi Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi dipandang dari luar masyarakat sebagai tujuan akhir untuk mencapai target.</li> </ul>
6.	Partisipasi Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan lembaga lokal.</li> <li>• Partisipasi sebagai suatu hak.</li> <li>• Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok masyarakat..</li> </ul>
7.	Partisipasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif secara independen</li> <li>• Pihak luar merupakan <i>advisor</i>.</li> </ul>

Sumber (Source) : Awang, 2003 (diolah)

#### D. Reposisi Konsep Hutan Kemasyarakatan

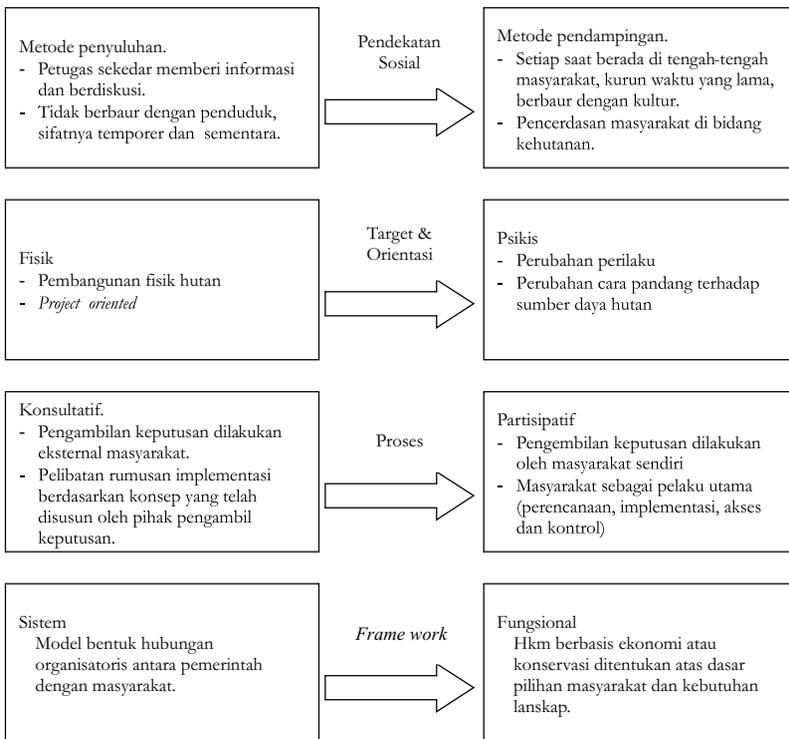
Banyak alasan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, antara lain untuk : (a) merumuskan persoalan dengan lebih efektif, (b) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, (c) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan (d) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian sehingga memudahkan penerapan (Bruce Mitchell, Setiawan, dan Rahmi, 2000).

Nilai penting tentang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dinyatakan juga oleh Iskandar (1999a). Menurutnya untuk mencapai manajemen hutan lestari diperlukan konsultasi dengan seluruh kelompok masyarakat. Proses ini sebaiknya bersifat terbuka dan terus menerus sekaligus sebagai proses pendidikan untuk mencapai kelestarian sumber daya hutan, kelestarian manfaat dari semua jenis hutan dan kelestarian bagi seluruh kelompok masyarakat.

Hal yang mendasar dalam pengelolaan hutan partisipatif adalah masyarakat diajak berpartisipasi, diajak pula memahami keuntungan dan pengorbanan yang harus dilakukan dalam kegiatan. Singkatnya, semua komponen masyarakat diberi informasi selengkap-lengkapnya (Iskandar, 1999b).

Sejalan dengan latar belakang tersebut dan sejumlah kelemahan implementasi HKm di Koto Panjang Riau, serta menuju partisipasi mandiri dalam pengelolaan sumber daya hutan, maka dipandang perlu melakukan reposisi konsep Hutan Kemasyarakatan. Konsep HKm yang dilakukan selama ini masih menitikberatkan pada pembangunan fisik, sehingga belum memberikan dampak terhadap perubahan perilaku dan cara pandang terhadap sumber daya hutan. Proses dan pendekatan pelibatan masyarakat itu sendiri masih belum tepat, karena upaya pelibatan tersebut bersifat konsultatif belaka. Pengambilan keputusan telah dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah, baru kemudian dibawa ke tengah masyarakat untuk dibahas dan merumuskan beberapa poin teknis implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan serta mendorong situasi partisipatif dalam program Hutan Kemasyarakatan masa mendatang diperlukan metode pendampingan yang lebih efektif. Pendamping harus berada di tengah-tengah masyarakat dalam kurun waktu yang lama dan terus menerus, agar proses transfer pengetahuan berlangsung secara maksimal dan menumbuhkan kesadaran dari dalam baik personal maupun kultural mengenai pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan masyarakat. Lebih jelas beberapa pemikiran pergeseran konsep Hutan Kemasyarakatan diuraikan pada diagram berikut ini.



Gambar 1. Reposisi konsep Hutan Kemasyarakatan

Figure 1. Reposition of Community Forestry Concept

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Terdapat 2 bentuk partisipasi masyarakat Desa Tanjung dan Tanjung Alai dalam program Hutan Kemasyarakatan, yaitu partisipasi dalam bentuk ide/gagasan/pemikiran dan jasa/tenaga. Keduanya diberikan pada 3 tahap pembangunan HKM, yakni : perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi masyarakat relatif rendah dalam bentuk pemikiran pada tahap perencanaan dan pemantauan HKM. Sedangkan pada tahap pelaksanaan HKM partisipasi masyarakat relatif tinggi dengan keterlibatan dalam bentuk jasa/tenaga. Berdasarkan karakternya maka partisipasi masyarakat pada program HKM di Koto Panjang ini tergolong tingkat partisipasi untuk insentif. Akan tetapi terdapat beberapa potensi masyarakat belum dimanfaatkan, yaitu organisasi penggerak belum bekerja secara maksimal, dan persepsi masyarakat tentang HKM serta sistem pertanian belum dibangun secara optimal.

### B. Saran

Untuk memperbaiki partisipasi masyarakat dalam program HKM dan program lainnya dalam konteks pengelolaan hutan partisipatif atau berbasis pada masyarakat, paling tidak diperlukan 3 perubahan mendasar. Pertama, meningkatkan pola partisipasi dalam segala bentuknya baik pikiran, jasa/tenaga maupun materi melalui pengubahan pendekatan insentif/subsidi menjadi pendekatan dana bergulir, dan memperbaiki orientasi HKM dengan mengutamakan konsep yang berorientasi hasil jangka pendek.

Kedua, perlu menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasional dan dampak HKM dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, penyuluhan, optimalisasi pendampingan, serta intensifikasi dan/atau perubahan pola pendekatan sosial. Pembinaan yang terus menerus, merata dan metode pendekatan yang preferentif akan sangat membantu meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat.

Ketiga, secara menyeluruh diperlukan reposisi konsep Hutan Kemasyarakatan, meliputi : (1) perubahan konsep pendekatan sosial dari metode penyuluhan ke pendampingan, (2) perubahan target dan orientasi dari fisik dan *project oriented* ke arah psikis yakni perubahan perilaku dan cara pandang, (3) perubahan pendekatan proses dari konsultatif menuju partisipatif, dan (4) perubahan *frame work* dari HKM berbasis sistem menuju HKM berbasis fungsi bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Kreasi Wacana bekerja sama dengan Center of Critical Social Studies. Yogyakarta.
- Iskandar, Untung, 1999a, Aplikasi Manajemen Teknologi Menuju Manajemen Hutan Lestari, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- , 1999b, Dialog Kehutanan dalam Wacana Global, Biagraf Publishing, Yogyakarta.

- Bruce Mitchell, Setiawan & Dwita Hadi Rahmi. 2000. Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rusli, Zaili. 2001. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Jiana volumue 1 nomor 1. Edisi Juli 2001.
- Simon, Hasanu. 1996. Metode Inventore Hutan. Aditya Media. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2003. Statistik Non Parametrik untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.